



Buletin Parlementaria

Nomor 1061/III/VII/2019 • Juli 2019



4TH

MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

DPR Dukung Milenial Bangun Aplikasi Medsos



7 Komisi I Tetapkan 9
Komisioner KPI Pusat



18 Pemerintah Diminta
Serius Selesaikan
RUU Ekraf



9 772614 339005

DPR Dukung Milenial Bangun Aplikasi Medsos

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong kaum milenial (muda) untuk membangun aplikasi dan platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram yang murni buatan atau karya anak bangsa sendiri. Menurutnya, masa depan bangsa ditentukan oleh kaum milenial, tak berlebihan jika dikatakan bahwa kaum milenial merupakan salah satu aset bangsa.

“Kaum milenial jangan hanya bisa bertindak sebagai pengguna media sosial saja, diharapkan juga dapat membangun sendiri aplikasi atau *platform* media sosial karya anak bangsa. Dengan demikian ketergantungan Indonesia kepada sosial media yang dibangun oleh negara lain (Amerika Serikat) menjadi berkurang,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam acara *Meet Up* Ketua DPR RI bersama Pegiat Media Sosial dan Netizen 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Dapat dibayangkan jika Amerika Serikat dan China memblokir media sosial yang banya dipakai di Indonesia, tentu aktivitas yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia. “Ini peluang sekaligus tantangan bagi kaum milenial untuk membuat media sosial sejenis seperti Facebook, Instagram dan Twitter karya anak bangsa. Sehingga ketika Amerika Serikat memblokir aplikasi atau *platform* tersebut, tidak akan terlalu berpengaruh pada negara ini,” ucapnya.

“Indonesia harus mencontoh hal tersebut, dan kami, DPR RI mendorong kaum milenial dan anak bangsa lainnya untuk bisa menjawab tantangan dan peluang tersebut dengan membangun *platform* atau aplikasi media sosial sendiri,” tantang politisi dapil Jawa Tengah VII itu.



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam acara *Meet Up* bersama Pegiat Media Sosial dan Netizen. Foto: Jaka/Man

Selain itu, di hadapan *netizen* dan pegiat media sosial Bamsoet menceritakan seringkali media menyajikan ruang rapat komisi di DPR RI kosong. Ia menerangkan sebetulnya Anggota DPR RI tersebut tetap bekerja. Misalnya, tengah melakukan kunjungan kerja, baik itu dalam menyerap dan menghimpun aspirasi untuk pembuatan undang-undang, ataupun melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Begitupun ketika DPR RI melakukan kunjungan ke luar negeri dalam bentuk studi banding, mengingat hal yang dipelajari belum tentu ada di dalam negeri. “Kami mencoba untuk membuka silaturahmi DPR RI dengan kaum milenial, seperti yang kita lakukan hari ini. Agar mereka dapat mengenal lebih jauh DPR RI, beserta tugas dan fungsi yang dilakukannya setiap hari,” ucapnya.

Dengan melihat secara langsung kegiatan DPR RI, maka kaum milenial yang notabene merupakan *netizen* dengan jumlah *follower* (pengikut) yang banyak, dapat menampik berita negatif tentang DPR RI yang beredar di media massa maupun media sosial. Sekaligus

menyiarkan atau mempublikasikannya kepada orang banyak, atau paling tidak kepada *follower*-nya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang ikut mendampingi Ketua DPR RI mengatakan bahwa pihaknya akan secara reguler membuat kegiatan sejenis. Hal ini tidak lain sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi DPR RI kepada kaum milenial terutama *netizen* atau pegiat media sosial lainnya.

“Sebenarnya kita tidak ingin membuat *image* DPR RI selalu baik atau bagus. Namun paling tidak apa yang dikatakan atau dipotret media tentang DPR RI, merupakan kenyataan yang sebenarnya, yang baik ya katakan baik, dan kalau tidak baik ya kami tidak menutupinya,” kata Indra.

Selama ini, tambah Indra, banyak informasi yang tidak pas tentang DPR RI beredar di media sosial dan media masa yang menggambarkan bahwa DPR RI selalu negatif. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah banyak tugas dan fungsi yang telah dilakukan DPR RI selama ini. ■ ayu/es

Utut Adianto Yakin Pansel Calon Anggota BPK Objektif

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto yakin Panitia Seleksi Komisi XI DPR yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota BPK akan melakukan seleksi secara objektif tanpa melihat latar belakang politik pelamar.

“Saya yakin dalam *fit and proper test* tidak melihat dari perkawanan, tetapi benar-benar menyeleksi calon BPK yang professional di bidang keuangan,” tegasnya usai memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan V di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Meskipun ramai diberitakan sejumlah calon legislatif yang gagal dalam

Pemilihan Umum (pemilu) serentak 2019 mendaftar sebagai calon Anggota BPK, Utut tidak mempermasalahkannya karena itu merupakan hak setiap individu.

“Mendaftar menjadi calon anggota BPK menurut saya itu hak setiap warga negara Indonesia (WNI), jadi kalau ada rekan dari kalangan politisi yang gagal dalam pileg lalu, mendaftar itu merupakan hak mereka,” tambah politisi PDI-Perjuangan ini.

Terakhir, Utut berharap BPK ke depannya bisa meminimalisir kerugian negara. Karena BPK merupakan sebagai satu-satunya badan yang bisa menyampaikan adanya kerugian negara dapat meminimalisir kerugian negara. ■ rnm/es



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan V. Foto: Eno/Man



4th DPR Dukung Milenial Bangun Aplikasi Medsos

7 Komisi 1 Bertindak 9
Komisioner KPI Pusat

18 Pemilihah Dinitia
Berita Selektahan
RUU Ekur

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Purnho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,
Gerald Oppie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Paripurna Sahkan Dua RUU Kerja Sama Indonesia-Iran



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima laporan pembahasan dua RUU Kerja Sama Indonesia - Iran dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Foto: Andri/Man

Upaya menanggulangi adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana serta memberantas tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, diperlukan kerja sama antar negara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral. DPR RI bersama pemerintah telah sepakat menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama dengan Republik Islam Iran.

Melalui Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (5/7), dengan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, seluruh Anggota DPR RI bersama pemerintah menyatakan persetujuan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran

tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyampaikan, dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2019, Komisi III DPR RI berharap adanya peningkatan hubungan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan.

“Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, selanjutnya dapat

semakin mendukung penegakan hukum di Indonesia,” tutur politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Erma menjelaskan bahwa kesepakatan ini harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, serta mengacu pada asas tindak pidana ganda. Ia juga menambahkan bahwa isi perjanjian tersebut telah mengatur segala komponen yang dibutuhkan.

“Dalam isi Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran ini diatur antara lain mengenai ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian,” ungkap politisi daerah pemilihan Kalimantan Barat ini.

Sementara itu pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mochammad Fachir menyampaikan bahwa kerja sama dengan Republik Islam Iran ini akan menjadi dasar hukum guna meningkatkan efektivitas kerja sama penanggulangan dan pemberantasan tingkat pidana terutama yang bersifat transnasional antar dua negara tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang atau perpindahan barang dari satu ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Seiring dengan kemajuan tersebut menurut Fachir muncul dampak yang signifikan pada hubungan antar negara baik dampak positif maupun dampak negatif. ■ er/es



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Pimpinan Tinggi Parlemen Libya (Chairman of Libyan Supreme Council) HE Khalid Al Mishri. Foto: Oji/Man

DPR Dukung Terciptanya Perdamaian di Libya

Hubungan diplomasi Indonesia dengan Libya telah terjalin selama 28 tahun lamanya. Hal ini ditandai dengan dibukanya Kedutaan Besar Indonesia di Tripoli, Ibu Kota Libya, dimana Libya juga membuka kedutaan besarnya di Jakarta.

Kedua negara juga tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation, serta Anggota KTT Gerakan Non-Blok yang memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan.

Guna memperkuat hubungan bilateral baik di sektor politik, ekonomi, hingga pendidikan antar kedua negara, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut kunjungan Pimpinan Tinggi Parlemen Libya (Chairman of Libyan Supreme Council) HE Khalid Al Mishri beserta keempat Anggota Parlemen dan jajarannya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

“Hari ini kami menyambut Pimpinan Parlemen Tinggi dari Libya, yang mengharapkan dukungan Indonesia dalam hal pengakuan

pemerintahan Libya, yang hingga hari masih mengalami pemberontakan. Sehingga kita semua berharap itu segera berakhir, agar rakyat Libya bisa hidup tenang dan sistem negara dapat kembali dibangun demi kesejahteraan rakyatnya,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI.

Kunjungan delegasi Parlemen Libya juga turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini, dan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Selain mengunjungi Gedung DPR RI, delegasi Parlemen Libya juga dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan mengunjungi TMII dan Masjid Istiqlal.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan sudah menitipkan pesan kepada Menteri Luar Negeri RI untuk turut membantu perdamaian di Libya, mengingat pada tahun ini Indonesia resmi menyandang posisi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

“Tentu kita mendukung supaya proses damai cepat dan pemerintahan yang baru terpilih melalui proses demokrasi segera terbentuk sehingga pembangunan segera berjalan. Saya juga sudah menitipkan pesan kepada Menlu untuk dibantu, posisi Indonesia *kan* sekarang Anggota Dewan Keamanan PBB. Meski anggota tidak tetap, paling tidak mereka dibantu untuk jadi negara yang stabil,” pungkas Fahri.

Hubungan diplomasi Indonesia-Libya semakin menguat ketika kedua belah pihak bekerja sama memfasilitasi perdamaian di Filipina Selatan pada tahun 1996. Hubungan sektor perdagangan kedua negara juga kian meningkat dengan nilai perdagangan yang naik dari 180 juta dollar pada tahun lalu, hingga terus meningkat menjadi 187 juta dollar AS tahun ini. “Kami sangat senang datang ke Indonesia yang sudah kami anggap seperti saudara sendiri,” kata Pimpinan Tinggi Parlemen Libya HE Khalid Al Mishri di akhir pertemuan.

■ alw/sf

DPR Nilai Kualitas Pelayanan Haji Semakin Baik

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri

Hamzah petugas Haji yang terdiri dari tenaga kesehatan Kementerian Agama (Kemenag) hingga petugas dari TNI dan Polri ini, dinilai sudah memiliki kualitas dan proporsi yang semakin baik. Bahkan setiap tahunnya jumlah petugas Haji juga meningkat.

“Kita selalu ingin teman-teman kita di TNI dan Polri terlibat, karena biasanya lebih terlatih menangani lapangan. Dari tahun ke tahun, berdasarkan rekomendasi dari Komisi VIII dan Timwas, petugas kita yang berlatar belakang TNI dan Polri juga kita tingkatkan,” jelas Fahri saat melepas lebih dari 200 petugas Haji yang akan menuju Tanah Suci dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/9).

Persiapan pelayanan Haji, tambah legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, selalu diupayakan membaik pada setiap tahunnya. Terlebih lagi, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU PIHU) yang membuat proses belanja dan proses pengelolaan dana Haji menjadi terpisah.

“Penambahan petugas Haji sudah dilakukan sebanyak 100 orang. Karena prosesnya sudah dipisah jadi kesigapan untuk melayani tambahan jamaah harusnya membaik. Jadi para petugas Haji kita tidak perlu direpotkan oleh soal-soal terkait pertanggungjawaban keuangan nantinya. Sehingga kita bisa fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada jamaah,” tambah Fahri yang turut didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong dan Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan.

Tahun ini, jumlah jemaah Haji asal Indonesia mencapai 231 ribu jemaah, dengan tambahan kuota sebesar 10 ribu jemaah. Penambahan petugas Haji juga dilakukan seiring dengan penambahan jemaah, dengan total 4200 petugas. “Bayangkan kalau jemaah ditambah, itu kan mesti di-*set up* semuanya, mulai dari tambah logistik, transportasi, petugas, pemondokan, tenda. Itu kita sudah fleksibel,” ujar Fahri, se usai melepas petugas Haji.

Terkait dengan Tim Pengawas (Timwas) Haji, DPR RI bersama dengan lembaga lainnya seperti BPK dan DPD, direncanakan akan berangkat pada 31 Juli mendatang. “Bersama dengan timwas dari lembaga-lembaga lain, nanti akan kita adakan pertemuan di beberapa tempat, baik pada daerah kerja di Madinah, juga secara khusus di Mekkah dimana penanganan jemaah paling banyak ada di daerah ini,” tutup Fahri. ■ atw/sf



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah melepas ratusan petugas Haji dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Foto: Gerald/Man



Komisi I Tetapkan 9 Komisioner KPI Pusat



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Foto: Grace/Man

Komisi I DPR RI menetapkan 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terpilih untuk masa jabatan 2019-2022. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, kesembilan nama tersebut dipilih melalui mekanisme voting atau pemungutan suara setelah 34 calon Anggota KPI Pusat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang berlangsung selama 3 hari.

Kesembilan nama Komisioner KPI Pusat terpilih adalah Nuning Rodiyah (49 suara), Mulyo Hadi Purnomo (49 suara), Aswar Hasan (47 suara), Agung Suprio (44 suara), Yuliandre Darwis (43 suara), Hardly Stefano (42 suara), Irsal Ambia (41 suara), Mimah Susanti (33 suara) dan Mohamad Reza (29 suara).

“Dari uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan, Komisi I berkesimpulan bahwa nama-nama tersebut layak menjadi Komisioner KPI periode 2019 - 2022,” ujar Abdul Kharis usai

memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7). Kharis menuturkan, mekanisme voting dilakukan berdasarkan kesepakatan rapat internal Komisi I DPR RI, sehingga terpilih 9 nama dari 34 kandidat nama calon anggota KPI.

Selain 9 nama Anggota KPI Pusat terpilih, juga dipilih 3 nama cadangan. Ketiga nama tersebut adalah Ubaidillah (24 suara), Imam Wahyudi (14 suara) dan Dayu Padmara Rengganis (9 suara). Tiga nama cadangan akan dipilih bilamana ada komisioner terpilih yang berhalangan.

Selanjutnya, hasil voting akan diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. “Sembilan nama ini akan kita kirimkan ke Pimpinan DPR untuk diteruskan ke Presiden, sehingga pada tanggal 27 Juli masa bakti KPI periode 2016-2019 berakhir akan dilanjutkan Komisioner yang baru terpilih,” tandas Kharis. ■ *ann/sf*

DPR Semangat Tuntaskan RUU PDP

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menegaskan, seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI sangat bersemangat untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebelum berakhirnya periode 2014-2019. Komisi I DPR RI menganggap RUU PDP sebagai produk legislasi yang krusial untuk mendukung ekosistem digital yang sehat di Indonesia.

Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7), ia menjelaskan bahwa data pribadi yang dimiliki masyarakat di dunia maya dapat terlindungi dengan adanya UU tersebut. Namun menurutnya semangat ini tidak dibarengi oleh keseriusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Tetapi kalau pemerintah sendiri belum menyodorkan, sementara konsep

daripada UU PDP adalah *government initiative*, ya susah. Kita menganggap kalau tidak tercapai sekarang, ya akan tercapai pada periode yang akan datang, itu pasti akan lama lagi. Mereka beralasan masih banyak pasal-pasal yang bertabrakan. Menurut saya justru itu, proses sinkronisasi ada di mereka di pemerintah,” ujar Satya.

Ia juga mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antar Fraksi di DPR RI mengenai pembentukan RUU PDP tersebut. “Bahkan seluruh Fraksi memang menginginkan adanya perlindungan mengenai data pribadi ini. Tidak ada pertentangan kepentingan, semua sangat mendukung. Tanyakan pemerintah kapan draf itu bisa segera dimasukkan ke DPR,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Satya juga membeberkan tahapan agar masyarakat dapat mengawal pembahasan RUU PDP untuk segera diselesaikan. Setelah selesai harmonisasi di Sekretariat Negara akan

masuk ke Badan Legislasi (Baleg), kemudian draf akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diputuskan di Paripurna DPR RI. Dalam Paripurna harus ada Amanat Presiden (Ampres), karena RUU PDP tersebut merupakan usulan Pemerintah. ■ *er/sf*



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha.
Foto: Gerald/Man

Banyak Regulasi Penyelenggaraan Pemilu Harus Diperbaiki



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron bertukar cenderamata dengan Wakil Wali Kota Bekasi di KPU Kota Bekasi. Foto: Oji/Man

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 serta Anggota KPPS yang meninggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Komisi II DPR RI melihat masih banyak regulasi penyelenggaraan Pemilu yang harus diperbaiki ke depan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan krusial mengenai carut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Demikian diungkapkan Herman saat pertemuan dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Bekasi dan jajarannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi di Kantor KPU Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/7).

“Kami terus melakukan uji petik, baik di KPUD Kabupaten/Kota maupun di KPUD Provinsi untuk mendalami situasi Kepemiluan 2019. DPT adalah dasar untuk memilih, sehingga inilah yang menjadi krusial harus kita dalam seperti apa penetapan DPT ke depan. Jika masih banyak DPT bermasalah, maka potensi celah kecurangan masih marak terjadi. Ini harus segera diatasi sejak sekarang untuk Pemilu ke depan yang lebih baik,” imbuhnya.

Permasalahan berikutnya, jelas Herman, mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan. Apakah harus dilakukan dengan serentak ataukah ada cara lain yang lebih menjamin hasil yang *legitimate* (diakui). “Indikasi adanya kecurangan, *money politic* dan lain sebagainya yang sesungguhnya harus kita evaluasi ke depan. Ketua KPUD Kota Bekasi menyatakan godaan itu selalu ada dan tentu celah-celahnya juga ada,” papar politisi F-PD.

Herman menyarankan agar ada langkah identifikasi awal untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang basisnya adalah untuk menutupi berbagai celah permasalahan dan mewujudkan Pemilu yang lebih baik.

“Kita undang Pemda, Kepolisian, Kejaksaan dan pihak terkait yang bisa urun rembuk apa sebenarnya yang harus kita perbaiki dari pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak,” tandas legislator dapil Jabar VIII ini.

Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni berharap pertemuan ini memperoleh masukan dari Anggota Komisi II DPR RI dan pihak terkait demi perbaikan kinerja KPU Kota Bekasi.

“Kami laporkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di wilayah kerja KPU Kota Bekasi, alhamdulillah berjalan aman, kondusif dan terkendali sesuai harapan,” ungkap Nurul.

Ia menambahkan, salah satu yang menjadi catatan dalam evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak lalu adalah beban kerja petugas KPPS yang cukup berat, sehingga jatuh korban jiwa akibat kelelahan maupun penyakit kronis yang sudah diderita sebelumnya.

“Oleh sebab itu kami memberikan catatan khusus mengenai perlunya tes kesehatan bagi para petugas KPPS, jaminan kesehatan (asuransi) selama menjalankan tugas serta besaran honor yang diterima agar ditinjau ulang. Honor Rp 455 ribu menurut kami tidak sebanding dengan beban kerja petugas KPPS di lapangan,” jelas Nurul kepada Komisi II DPR RI. ■ oji/sf

Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya **Gunakan Data Dukcapil**

Komisi II DPR RI mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyarankan agar data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dijadikan sumber rujukan utama untuk pemilu yang akan datang.

“Saya pribadi cenderung kepada data yang didapat dari Ditjen Dukcapil, karena perekaman e-KTP kita sudah hampir 95 persen. Jadi gunakan data yang mahal ini untuk semua kegiatan khususnya Pemilu,” papar Mardani usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati terkait evaluasi Pemilu 2019 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (9/7).

Saat ini ada dua sumber data untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), menurut politisi Fraksi PKS itu, dari kedua sumber tersebut terkendala dalam masalah agregasi, maka sebaiknya pemilu yang akan datang lebih baik fokus pada satu sumber data.

“DPT ini segera diselesaikan. Dua sumber data, satu dari Ditjen Dukcapil dan satu lagi hasil dari cokolit (pencocokan dan penelitian) KPU. Memang dua sumber data ini mengagregasinya tidak mudah. Karena itu dari masukan yang berkembang, segera tetapkan salah satu sumber,” ungkapnya.

Pada pemilu lalu, proses pemutakhiran data pemilih terus mengalami perbaikan. Bahkan DPT mengalami perbaikan sebanyak 3 kali. Penetapan DPT Hasil Perbaikan III (DPTHP III) baru dilakukan pada tanggal 8 April 2019 atau 9 hari menjelang pemungutan suara.

Meskipun demikian, penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jatim dinilai baik oleh Mardani. “Karena petugas Pemilu nya saja berjumlah 1,2 juta. Mas Himawan (Plt. Asisten Sekda Jatim) menemani kami perwakilan dari Pemprovnya. 1,2 juta itu banyak sekali, dan ternyata berjalan dengan baik, 38 kabupaten kota hampir 30 juta lebih DPT,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Sekda Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan dari segi kemanan, secara umum Pemilu di Jatim berlangsung kondusif. Seluruh jajaran Pemprov Jatim telah membangun komunikasi yang sinergis antar komponen yang ada. Terlebih lagi, ada peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan, diikuti dengan suara sah.

“Di Jawa Timur ini seluruh Forkompinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) kompak, Ibu Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam, Pak Kajati bersama KPU dan Bawaslu itu sering bertemu dan membicarakan proses, kalau ada apa-apa dalam pelaksanaan langsung bisa diatasi,” jelas Himawan. ■ eko/es

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
Foto: Eko/Man



Politik Uang Diduga Masih Ada Dalam Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menduga politik uang (*money politic*) pada proses penyelenggaraan Pemilu masih terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, hal ini seolah-olah sudah menjadi tradisi pada setiap kontestasi yang dilaksanakan, bahkan seringkali Pemilu dikonotasikan negatif dengan ungkapan 'harus ada uang'.

"*Money politic* kemungkinan masih terjadi, karena ini kembali kepada budaya masyarakat secara nasional. Kenapa pemilu ini selalu dikonotasikan bahwa harus ada uang untuk pemilih? Mereka (pemilih) kalau tidak diberikan uang transportasi dan uang saku, mereka tidak mau datang (memilih)," ujar Firman usai pertemuan dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah dan jajarannya, serta KPU, Bawaslu di

Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/7).

Menurut politisi Partai Golkar itu, tindakan *money politic* yang mengiringi kegiatan pemilu ini harus dievaluasi. Bagaimana caranya agar praktek ini dapat diminimalisir mengingat besarnya anggaran yang harus dikeluarkan para calon legislatif dalam memperebutkan simpati masyarakat.

”

**MONEY POLITIC
KEMUNGKINAN MASIH
TERJADI, KARENA
INI KEMBALI KEPADA
CULTURE MASYARAKAT
SECARA NASIONAL.**

Pada pertemuan ini, Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI menggali masukan dari Pemprov Jateng, KPU dan Bawaslu terkait dengan apa saja yang terjadi di lapangan pada saat Pemilu 2019. Hal ini diperlukan untuk merevisi Undang-Undang Pemilu, agar ke depan bisa lebih baik lagi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi mengatakan untuk meminimalisir adanya pelanggaran politik uang, pada pemilu lalu, Bawaslu Jateng telah meresmikan 47 desa anti politik uang serta sosialisasi berkelanjutan terkait pemahaman daya rusak politik uang kepada pemilih.

"Sosialisasi anti politik uang terus kita lakukan, bukan hanya saat berlangsungnya pemilu saja," pungkasnya kepada Tim Kunspek Komisi II DPR RI. ■ eno/es



Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo memimpin pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, KPU, Bawaslu Jawa Tengah. Foto: Eno/Man

UU Pemasarakatan Belum Atur Warga Binaan Anak-Anak



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik memimpin Focus Group Discussion (FGD) RUU Pemasarakatan di Bali. Foto: Husen/Man

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan belum mengatur secara optimal warga binaan anak-anak. Ini salah satu isu penting dalam merevisi UU tersebut. Komisi III DPR RI kini sedang merumuskan RUU Pemasarakatan untuk menyempurnakan UU lama yang sudah ketinggalan zaman.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengemukakan hal itu saat memimpin pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para akademisi dan mitra kerja Komisi III, di Jimbaran, Bali, Senin (8/7). “RUU ini merupakan penyempurnaan UU Pemasarakatan lama yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Diantaranya belum mengatur anak-anak yang jadi warga binaan,” jelas Erma.

RUU Pemasarakatan tersebut sedang dikejar penyelesaiannya tahun

”

**RUU INI MERUPAKAN
PENYEMPURNAAN UU
PEMASYARAKATAN
LAMA YANG SUDAH
TIDAK SESUAI
KEMAJUAN ZAMAN.
DIANTARANYA BELUM
MENGATUR ANAK-
ANAK YANG JADI
WARGA BINAAN,”**

ini sebelum masa periode keanggotaan DPR RI berakhir pada September 2019. FGD di Bali ini menjadi yang ketiga, setelah sebelumnya Komisi III DPR juga menggelar FGD serupa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Masih banyak isu lain yang perlu mendapat perhatian RUU ini seperti masalah klasik lembaga pemasarakatan, yaitu over kapasitas.

Selain menghadirkan para pakar dan akademisi dari beberapa universitas di Bali untuk memberi masukan atas RUU ini, hadir pula perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkum HAM Bali, Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Pengadilan Tinggi Bali. Selanjutnya, RUU ini akan dibawa ke rapat konsinyering di Jakarta pada 15 Juli 2019. Diharapkan RUU Pemasarakatan bisa segera disahkan tahun ini dalam rapat paripurna DPR. ■ mh/sf

Permasalahan Limbah B3 Batam Harus Diselesaikan

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan, banyaknya pengiriman kontainer dari luar negeri yang terindikasi berisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, harus segera diselesaikan. Hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan Bangsa Indonesia dan mencederai nama baik Tanah Air.

“Indonesia negara besar dan berdaulat. *Masak* bangsa sebesar ini jadi tempat pembuangan sampah-sampah dari luar negeri. Tentu kita sebagai masyarakat tidak akan rela,” papar Gus Irawan saat memimpin

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Batam, Kepri, Jumat (5/7).

Politisi Partai Gerindra ini menilai, permasalahan sampah limbah tersebut juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak, terutama PT. Sucofindo. Pasalnya perusahaan tersebut berperan penting terhadap masuknya sampah ke wilayah Batam.

“Salah satu yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut adalah PT. Sucofindo, karena mereka yang meloloskannya. Walaupun saya juga *enggak yakin*, kalau memang betul-betul diperiksa, masa sampai kecolongan. Tentu ini harus diperdalam lagi,” pungkas Gus Irawan.

Gus Irawan memaparkan, total kontainer yang terindikasi membawa sampah dari luar negeri sebanyak 65 kontainer, dengan komposisi 11 kontainer dinilai aman, 16 kontainer tercampur, dan 38 kontainer terkontaminasi limbah B3.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan Sumatera Utara itu mengatakan, keberadaan para pengusaha merupakan aset penting bagi Bangsa Indonesia, karena turut serta dalam membayar pajak. Namun di sisi lain, pengusaha yang beroperasi di wilayah Indonesia juga harus menjaga lingkungan agar tetap sehat.

■ tn/sf



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau PT. Ton Indo Sukses, di Batam Foto: Taufan/Man

Komisi VII Dorong Pembangunan PPSLB3 di Mojokerto



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PPSLB3 di Kabupaten Mojokerto. Foto: Jaka/Man

Komisi VII DPR RI mendorong rencana Pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur segera direalisasikan. Pasalnya, hingga saat ini pengelolaan limbah industri khususnya limbah B3 untuk seluruh wilayah Indonesia terpusat Jawa Barat.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII meninjau lokasi pembangunan PPSLB3 di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (5/7). Ke

sdepan, kalau pembangunan PPSLB3 Mojokerto ini sudah terealisasi, limbah dari wilayah timur Indonesia bisa dialihkan ke sini.

“Rencana pembangunan ini strategis, untuk itu kami sangat mendorong agar segera direalisasikan. Kami harap tahun ini *ground breaking* (peletakan batu pertama) bisa dilakukan, mengingat, pembangunan ini sudah mendapatkan izin prinsip dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sudah disetujui untuk persiapan 5 hektar, diawali pembangunan pengolahan limbah rumah sakit, namun Analisis Dampak Lingkungan

(AMDAL) masih proses perizinan,” ujar Ridwan.

Menurut Informasi, kata Ridwan, rencana pembangunan pengelolaan limbah B3 ini juga masih terkendala penolakan dari warga sekitar. Tentu ini harus dijelaskan, dengan penerapan teknologi justru tidak akan ada pencemaran sama sekali. Justru masyarakat akan terlindungi dari limbah industri yang terbengkalai di sekitar pabrik karena tidak mampu dikirim ke Jawa Barat.

“Saya kira wajar ada penolakan. Mereka para aktivis-aktivis lingkungan yang menolak, jangan hanya melihat rencana pembangunan ini saja, tapi harus keliling melihat sekian puluh ribu pabrik-pabrik industri di Jawa Timur dan seluruh Indonesia membutuhkan PPSLB3, tidak mungkin bisa ditolak,” tandas politisi fraksi Partai Golkar ini.

Menurut legislator dapi Jawa Timur V ini, pembangunan PPSLB3 ini merupakan solusi agar industri tetap berjalan dalam rangka memutar roda perekonomian Indonesia tetapi tetap ramah lingkungan. Ini adalah bagian dari komitmen bangsa Indonesia kepada dunia, dimana Indonesia juga ikut meratifikasi perjanjian paris (Paris Agreement).

Rencananya, Pembangunan PPSLB3 Mojokerto akan dibangun di lahan milik Perum Perhutani dengan luas sekitar 50 hektar. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menunjuk salah satu BUMD di Jatim untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola PPSLB3. ■ jk/es

Komisi VII Sidak PT. Pindo Deli 3

Komisi VII DPR RI memastikan kegiatan produksi pengolahan sampah impor oleh PT. Pindo Deli III yang banyak dikeluhkan warga sekitar serta pemerhati lingkungan karena diduga membuang limbah cair secara langsung ke Sungai Cibeet. Atas dasar itu, Komisi VII DPR RI langsung melakukan sidak ke anak perusahaan PT. Sinar Mas di Karawang.

“Kita lihat langsung sampah ditaruh di sepanjang jalan dan sampah plastik yang menggunung. Ketika kami menayakan kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), seluruh aktivitas produksi Pindo Deli 3 memang belum memiliki izin lingkungan dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKLH),

namun masih tetap beroperasi,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam di saat melakukan sidak di PT. Pindo Deli 3, Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/9).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa adanya laporan dari yang tinggal di sekitar perusahaan yang merasa terganggu dengan pembuangan limbah cair yang diduga langsung dibuang ke sungai. “Ini sangat berbahaya sekali,” tambah Ihwan Datu. Ia mengingatkan agar PT. Pindo Deli melaksanakan pengolahan sampah maupun limbah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ia juga mengatakan, Komisi VII DPR RI ingin memastikan agar KLHK

mengawasi aktivitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Pindo Deli 3 yang memiliki luas area 128 hektar itu. Apabila terbukti melanggar peraturan, maka Komisi VII DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK untuk memproses secara hukum.

“Kita minta Ditjen Gakkum untuk ambil beberapa sampel serta melakukan investigasi pengelolaan sampah impor yang kita tinjau ini. Apakah sesuai aturan dan tidak mencemari lingkungan, kita berikan kesempatan kepada KLHK untuk menindaklanjuti hal itu secepatnya,” tegasnya.

Politisi dapil Kalimantan Timur ini secepatnya ingin memastikan apakah pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut masih sesuai regulasi atau tidak. KLHK diharapkan segera memberikan laporan kepada Komisi VII DPR RI, untuk dibahas dalam rapat kerja. “Apabila terbukti menyalahi aturan, maka akan diberikan sanksi tegas,” pungkasnya. ■ man/es



Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam bersama Tim Kunspek Komisi VII DPR RI saat sidak di PT. Pindo Deli 3, Karawang, Jawa Barat. Foto: Andri/Man



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat melepas petugas Haji 2019 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Foto: Geraldi/Man

Jemaah Haji Lansia Perlu Perhatian

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, terdapat lebih dari 4200 petugas Haji yang akan memberikan layanan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 1440 H/2019 ini. Dari jumlah tersebut, petugas kesehatan mendominasi lebih dari 60 persen, dimana komposisi risiko tinggi setiap kloternya tidak boleh melebihi 30 persen. Apalagi jemaah Haji banyak berusia lansia, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan risiko tinggi.

“Komposisi risiko tinggi mencapai 10 persen dengan tidak boleh melebihi 30 persen tiap kloternya, karena menyangkut masalah pelayanan,” papar Ali Taher mendampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melepas petugas

Haji 2019 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/7). Turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan.

Dari setiap kloter jemaah Haji, terdapat 5 orang petugas Haji yang terdiri dari satu orang dokter, dua orang perawat, ketua kloter dan pembimbing Haji masing-masing satu orang. Dengan pembagian tugas yang matang ini, Ali menilai tidak akan ada jemaah Haji yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

“Kita harap petugas memahami tugas pokok dan fungsinya, tidak semata-mata bertugas tetapi tupoksi itulah yang kita dorong dengan sebaik-baiknya. Harus ikhlas *lah*, sabar *lah*, dan baik sangka-*lah* dalam menolong jemaah Haji supaya mereka mendapat

jaminan perlindungan, pelayanan, dan pembinaan dengan sebaik-baiknya dan bisa berjalan secara maksimal,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Tidak hanya itu, legislator daerah pemilihan Banten ini juga mendukung pemberlakuan *fast track* atau layanan dini imigrasi jemaah Haji dari Arab Saudi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada tahun ini. Menurutnya, semua jemaah Haji seharusnya diberikan pelayanan *fast track*, karena jemaah ini datang hanya untuk ibadah, bukan mencari pekerjaan sebagaimana kekhawatiran pihak imigrasi.

“Nanti akan kita bicarakan. Kalau bisa semua tamu (jemaah) tidak usah pemeriksaan berbelit-belit. Begitu datang langsung bisa dicek dan kalau bisa sudah dilayani imigrasinya sejak di udara, sehingga begitu datang siap berangkat. Arab Saudi tanpa jemaah Haji kita akan mengalami kesulitan, bayangkan kalau Ka’bah tanpa jemaah Haji dari Indonesia pasti sepi, tidak akan ramai. Oleh karena jumlahnya banyak, perlu dapat perhatian banyak juga,” pungkas Ali Taher. ■ alw/sf

RUU Waspom Ditargetkan Selesai Sebelum Akhir Periode 2019

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Effendi mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) bisa diselesaikan sebelum akhir periode 2019. “Harapannya sebelum menyelesaikan periode ini RUU Waspom bisa disahkan menjadi undang-undang, untuk memberikan pengawalan dan rasa aman bagi masyarakat,” ungkapnya usai mengikuti rapat harmonisasi dengan Badan Legislasi DPR RI, baru-baru ini.

Saat ini RUU Waspom sudah memasuki tahap harmonisasi di Baleg. Menurut Dede RUU ini mudah dipahami oleh semua pihak, baik Panja dari Komisi IX yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi IX Saleh P Daulay atau pun Panja dari Baleg yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg M. Sarmuji. Dari pihak pemerintah yang ikut pun tidak ada perbedaan serius dalam pembahasan.

Berkaitan dengan klausul sanksi, tindakan hukum serta penindakan bagi pelanggar, Dede menjelaskan fungsi penindakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) antara UU Waspom dengan KUHP serta Permenkes akan disinergikan. Karena ada beberapa temuan di lapangan oleh BPOM memerlukan deteksi dan uji laboratorium. “Ada ke deputian untuk melakukan fungsi penindakan. Penindakan itu termasuk penyidikan, bekerja sama dengan Polri pasti,” ujar Dede.

Sanksi untuk pelanggar bisa pidana dan juga denda, besaran denda belum ditentukan karena

”

RUU WASPOM BISA DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG, UNTUK MEMBERIKAN PENGAWALAN DAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT,”

harus diharmonisasi dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dede mengharapkan sanksi denda sebaiknya dijatuhkan sebesar-besarnya, karena untuk memberikan efek jera. “Kita maunya sebesar-besarnya. Harus ada bunyi undang-undang yang secara tegas, siapa pun yang melakukan ini sanksinya

lebih besar dari apa yang dia jual,” tandas Dede.

RUU ini juga menjawab tuntutan era digitalisasi, seiring dengan maraknya penjualan obat secara *online*. Dia mengatakan vendor penjual obat *online* harus terdaftar. “Vendor-vendor yang menjual obat secara *online*, maka dia harus terdaftar dulu, pejualnya harus terdaftar. Kalau dia tidak memiliki lisensi di Badan POM sebagai pedagang obat atau makanan maka tidak diizinkan untuk menjual, termasuk juga *endorse*,” pungkas Dede.

■ eko/es

Ketua Komisi IX DPR RI
Dede Yusuf M Effendi.
Foto: Andri/Man



RUU Ekraf Disambut Baik Masyarakat Kaltim

Rancangan Undang - Undang tentang Ekonomi Kreatif yang sedang dibahas Komisi X DPR RI mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya Provinsi Kalimantan Timur. Dengan potensi yang sudah ada, diharapkan industri kreatif bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kaltim kedepannya.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Gubernur Kaltim untuk menjangring masukan terkait substansi RUU Ekraf di Samarinda, Kaltim, Kamis (5/7). Turut hadir perwakilan pelaku ekraf dan pihak terkait lainnya.

“Kami punya satu niat untuk membuat legislasi baru yang akan memperkuat ekraf dan ternyata di Kaltim sendiri sudah ada dua kota yang masuk dalam 10 besar Kota Ekonomi Kreatif Indonesia, yakni Kutai Kartanegara dan Balikpapan,” papar Hetifah.

”

...PEMROV KALTIM MENDORONG PERCEPATAN PENGESAHAN RUU EKRAF, SEHINGGA MENJADI PAYUNG HUKUM BAGI PARA PELAKU EKRAF DI SELURUH INDONESIA.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Kaltim. Foto: Anne/Man

Politisi Partai Golkar itu optimis, masukan langsung dari para pelaku ekonomi kreatif akan memperkuat RUU Ekraf. Nantinya, masukan tersebut akan menjadi substansi dalam proses pembahasan RUU yang merupakan inisiatif DPR RI itu. Ia mengaku cukup *surprise* dengan masukan dari masyarakat Kaltim.

“Catatannya kritis dan spesifik, seperti masalah kelembagaan, pendidikan sebagai tempat menciptakan SDM kreatifnya. Serta yang terpenting adalah bingkai istilah dari Pak Setda, yakni mendorong kreatifitas tetapi bingkai NKRI dan Pancasila tetap menjadi acuan untuk bisa mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia,” tandas Hetifah.

Dalam pertemuan tersebut, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani

menyampaikan, Pemprov Kaltim mendorong percepatan pengesahan RUU Ekraf, sehingga menjadi payung hukum bagi para pelaku ekraf di seluruh Indonesia. Menurutnya, RUU Ekraf memperjelas penanggungjawab hingga pendanaan bagi pelaku ekraf. Mengingat, permodalan masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekraf.

Ia juga mengimbau agar RUU Ekraf mengakomodir fasilitas akses pembiayaan perbankan, salah satunya pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai collateral (jaminan). “Kalau dilepas agak susah karena mungkin pihak perbankan lebih berhati-hati dalam memberikan akses permodalan. Karena itu, diharap dirumuskan hal yang mengatur karena permodalan menjadi pilar utama,” jelas Sa’bani. ■ ann/sf

RUU Ekraf Bangun Ekosistem Ekonomi Kreatif

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) masih perlu dibahas secara komperensif. Diharapkan, RUU yang tengah digodok Komisi X DPR RI bersama pemerintah ini dapat mewujudkan ekosistem yang ideal untuk perkembangan ekraf Indonesia.

Demikian diungkapkan politisi Partai Gerindra itu di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI untuk menjaring masukan RUU Ekraf ke Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kamis (4/7). Tim Kunspek dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS).

Nuroji mengatakan, hingga saat ini

Panja RUU Ekraf masih menjaring masukan dari berbagai *stakeholder* termasuk pelaku ekraf, sehingga nantinya RUU yang dihasilkan dapat menjawab pelbagai permasalahan yang ditemui, seperti masalah kelembagaan, permodalan, pemasaran serta hak kekayaan intelektual.

“Ini masih harus dipikirkan secara matang, tidak perlu terburu-buru. Seperti halnya ruang lingkup RUU Ekonomi Kreatif perlu di-*review* lagi sesuai masukan dari beberapa instansi terkait,” imbuh Nuroji seraya mengatakan, dirinya optimis RUU Ekraf dapat diundangkan sebelum Keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 berakhir.

■ opi/sf



Anggota Komisi X DPR RI Nuroji. Foto: Gerald/Man

Pemerintah Diminta Serius Selesaikan RUU Ekraf

Komisi X DPR RI menginginkan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pemerintah dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

diminta serius bersama DPR RI dalam menyelesaikan pembahasan RUU di bidang ekonomi kreatif ini.

“Pada prinsipnya Komisi X DPR RI tentunya ingin RUU ini segera diselesaikan, tapi kembali lagi kita juga meminta pemerintah supaya melihat mengantisipasi dan implementasinya,” kata Anggota Komisi X DPR RI

Ferdiansyah saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Kamis (4/7).

Politisi Partai Golkar ini juga meminta dorongan Presiden Joko Widodo untuk meminta kepada para penerima Surat Presiden, termasuk BKRAF untuk lebih serius dalam rangka mengkoordinasikan, supaya RUU Ekraf ini bisa menjadi UU.

“Kami mohon bantuan Presiden Jokowi untuk juga meminta kepada para penerima Surpres dan juga khususnya Badan Ekonomi Kreatif untuk lebih bisa meningkatkan koordinasi kepada sesama Kementerian yang ada di lingkungan pemerintah,” katanya.

Menurut legislator dapil Jawa Barat itu, hal-hal yang tidak kalah pentingnya dari keinginan Presiden Jokowi dalam konteks pengembangan SDM yang akan datang adalah pengembangan para pelaku atau Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekraf. ■ as/sf



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Agung/Man

”

PENGEMBANGAN SDM YANG AKAN DATANG ADALAH PENGEMBANGAN PARA PELAKU ATAU SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BIDANG EKRAF.

Komisi XI Dorong Penerimaan Pajak Bali



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafizs Tohir bertukar cenderamata dengan Kepala Kanwil DJP Bali Goro Ekanto. Foto: Eka/Man

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafizs Tohir memberikan apresiasi dan dorongan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, karena capaian pajak tahun 2018 berhasil mencapai di atas target rata-rata nasional. Capaian ini berkat meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Bali mencapai 90 persen. Wajib lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di Kanwil DJP Bali sebanyak 332.051 WP.

“Ini prestasi bagi Bali. Tapi ada persoalan yang tidak dimiliki di daerah lain, yaitu banyaknya orang asing bekerja, hanya izin 6 bulan sampai 1 tahun, tidak bisa kita akses pajaknya. Bahkan mereka memiliki properti, tapi *under name*,” kata Hafizs saat memimpin tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kepala Kanwil

DJP Bali Goro Ekanto beserta jajaran di Denpasar, Bali, Jumat (5/7).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan akan mencari solusi agar Bali tidak kehilangan potensi penerimaan pajak. Menurutnya, *potential loss* (potensi penerimaan pajak yang hilang) di Bali cukup tinggi. Pasalnya, dengan jumlah wisatawan hampir 10 juta per tahunnya, sangat berpotensi mendatangkan penerimaan pajak.

“*Potential loss* di Bali cukup tinggi, karena turis di sini hampir 10 juta dan itu merupakan hal yang sangat bagus. Kita sudah menerapkan sistem perpajakan yang berbasis data atau IT. Kita melihat bahwa penguatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) itu tidak terlalu signifikan, kalau kita bandingkan dengan *potential loss* yang ada di sektor perpajakan,” jelas Hafizs.

Menurutnya, sistem yang ada harus diperbaiki, sehingga bisa mengejar rasio pajak minimal 13 persen. “Ini target yang akan kita perbaiki. Di lain pihak kita memberikan insentif bagi pelaku bisnis yang mempunyai potensi pemasukan negara yang lebih besar, supaya industri bergairah dan ada pergerakan di sektor ekonomi di Republik Indonesia ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Goro Ekanto mengatakan, Pada tahun 2018, target penerimaan pajak di Bali mencapai Rp 10,5 triliun. Kanwil DJP Bali telah merealisasikan sebesar Rp 9,6 triliun atau 91,6 persen. Menurutnya, capaian ini di atas pencapaian rata-rata nasional. Sementara untuk tahun 2019, Kanwil DJB Bali ditargetkan meraup penerimaan pajak sebesar Rp 11,6 triliun. ■ hr/sf

Komisi XI Minta Pemerintah Evaluasi Penetapan Target Penerimaan Pajak

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai perlunya evaluasi terhadap cara pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak di setiap tahunnya. Ia berpendapat, Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab masalah tidak tercapainya target penerimaan pajak.

“Ini menjadi penting supaya kita mengetahui kenapa penerimaan pajak kita tidak tercapai? Adakah yang salah dengan cara kita menentukan target penerimaan pajak?” tanya Misbakhun usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, di Provinsi DKI Jakarta, Jumat (5/7).

Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga menekankan, jika dalam evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terdapat indikasi ataupun hal-hal yang tidak dapat diprediksi, namun tetap menetapkan target yang tinggi dalam penerimaan pajak, maka menurutnya ada yang salah dalam cara pemerintah menetapkan target.

“Kalau kita evaluasi, ada indikasi cara kita membuat target pajak ini ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol.

Hal-hal yang tidak diprediksi, tetapi kita

”

MENETAPKAN TARGET YANG TINGGI DALAM PENERIMAAN PAJAK, MAKA MENURUTNYA ADA YANG SALAH DALAM CARA PEMERINTAH MENETAPKAN TARGET.

tetap melakukan upaya-upaya yang terlalu tinggi dalam menetapkan target, tentu ini ada yang salah. Sehingga kita tidak bisa memprediksi suatu yang salah untuk diajukan acuan,” terang Misbakhun.

Lebih lanjut politisi dapil Jawa Timur itu meminta perlunya evaluasi bersama yang dilakukan oleh DPR RI dan Kemenkeu terhadap penetapan target penerimaan pajak. Sebab selama ini evaluasi hanya dilakukan secara sepihak saja oleh Kemenkeu. Sehingga langkah ini dapat diketahui secara bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

“Ya tentunya kalau kemudian target pajaknya tinggi, dengan asumsi penerimaannya tinggi, kemudian dipakai untuk pembiayaan pembangunan, mengoperasikan ke jalannya pembangunan, sementara target tidak tercapai, tentu cara mengatasi tidak tercapainya kan pemerintah mencetak surat utang. Ini yang risikonya terlalu besar,” tandas Misbakhun. ■ nap/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. Foto: Tasya/Man

Pemerintah Harus Berhati-Hati Dalam Berutang



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menyampaikan Laporan Pendahuluan RAPBN 2020 kepada Wakil Menteri Keuangan. Foto: Gerald/Man

DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini dikarenakan utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menyampaikan Laporan Pendahuluan RAPBN 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Jazilul juga mengingatkan agar pemerintah menjaga rasio utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DPR RI.

“Adapun arah dan strategi kebijakan pembiayaan utang yakni harus mengedepankan aspek kehati-hatian melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2020 untuk mendukung kesinambungan fiskal,” ujar Jazilul.

Selain itu, masih kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pemerintah juga harus memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif, sehingga tercipta efisiensi utang dan mampu menjaga keseimbangan makro, dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan.

Adapun hingga akhir Februari 2019, utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 531,46 triliun dibandingkan Februari 2018 yang sebesar Rp 4.034,80 triliun. Jika diperinci, total utang sebesar Rp 4.566,26 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.775,79 triliun.

Pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 783,33 triliun dengan rincian, pinjaman bilateral Rp 322,86 triliun, multilateral Rp 418,82 triliun, komersial Rp 41,66 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negerinya sebesar Rp 7,13 triliun. ■ hs/sf

RUU Waspom Didorong Tak Hambat Kreativitas Masyarakat

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhamad Sarmuji berharap keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU Waspom) nantinya tidak menghambat kreativitas masyarakat untuk berkreasi di bidang obat dan makanan. Justru bisa menstimulasi masyarakat untuk memproduksi obat dan makanan secara lebih baik berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku.

“Selain itu dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka membuat dan mengedarkan obat dan makanan,” kata Sarmuji Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beserta jajaran di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Rapat ini dalam harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan, dan tahapan konsepsi RUU Waspom.

”

SELAIN ITU DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT DALAM RANGKA MEMBUAT DAN MENGEDARKAN OBAT DAN MAKANAN,”

Sarmuji menjelaskan, rapat ini dalam rangka memperkuat, memperkaya wawasan Anggota dalam melakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan RUU Waspom. Menurut Sarmuji saat ini Indonesia belum memiliki UU yang secara spesifik mengatur jaminan standar persyaratan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. “Pengawasan obat dan makanan masih mengacu pada produk Belanda, yaitu *ordonansi* obat keras,” kata Sarmuji.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Baleg DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, dengan adanya undang-undang ini, nantinya BPOM akan optimal dan bisa bekerja secara mandiri untuk melakukan pengeledahan, penangkapan, dan bekerjasama dengan Kepolisian. “Dengan adanya undang-undang ini, kita bisa memberikan sumber daya yang lebih baik untuk melawan tindak kejahatan obat dan makanan,” harap Reni.

■ sun/sf



Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhamad Sarmuji. Foto: Andri/Man

Fadli Zon Lantik Dua Pimpinan BKSAP



...BKSAP TETAP MENJALANKAN AMANAH DENGAN BAIK SERTA MEMBERIKAN KONTRIBUSI NYATA DALAM PERTEMUAN PARLEMEN MAUPUN ORGANISASI DUNIA.

Dua pimpinan baru mengisi kursi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Mereka adalah Surahman Hidayat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Achmad Farihal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Keduanya dilantik langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Kepada kedua pimpinan baru, Fadli secara simbolik menyerahkan palu rapat usai membacakan keputusan Pimpinan DPR RI soal pergantian Pimpinan BKSAP. Pelantikan berlangsung di ruang rapat BKSAP, Gedung DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

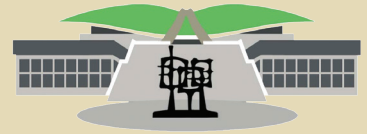
Dalam surat tersebut disebutkan Surahman Hidayat menggantikan Rofi Munawar, sementara Achmad Farihal menggantikan Hasrul Azwar. Fadli berharap, di masa periode yang masih 2 bulan ini, BKSAP tetap menjalankan amanah dengan baik serta memberikan kontribusi nyata dalam pertemuan parlemen maupun organisasi dunia.

Surahman Hidayat dalam sambutannya tetap optimis menjalankan tugas pokok dan fungsi BKSAP dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melakukan diplomasi parlemen.

Ia menyebutkan, BKSAP dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah konferensi antar parlemen atau *World Parliamentary Forum on Sustainable Development*. Forum ini akan dihadiri delegasi parlemen serta organisasi internasional dari berbagai negara guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. ■ ann/es



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melantik dua Pimpinan BKSAP. Foto: Jaka/Man



Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR RI M Nasir Zamil beserta Baiq Nuril dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Ajukan Amnesti, DPR Setuju? di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7). Foto: Geraldi/Man



Bibliobattle atau kegiatan mengulas buku yang diselenggarakan Perpustakaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen dan BK DPR RI Nunu Nugraha Khuswara di Perpustakaan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7). Foto: Arief/Man



Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Majalah dan Buletin *Parlementaria*, Bagian Penerbitan, Biro Pemberitaan Parlemen, SETJEN dan BK DPR RI ke Perpustakaan Universitas Palangka Raya dan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (2/7). Foto: Dito

